

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
VIDEO MELANGGAR KESUSILAAN BERDASARKAN HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh

Yudia Mahfudz

NIM. 05040321095



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudia Mahfudz
NIM : 05040321095
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran
Video Pribadi Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Pidana
Islam
(Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 6 April 2025

Saya yang menyatakan,



Yudia Mahfudz

05040321095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

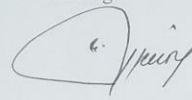
Skripsi yang ditulis oleh;

Nama : Yudia Mahfudz
NIM : 05040321095
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video
Pribadi Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Sidoarjo, 6 April 2025

Pembimbing.



Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197704152006041002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yudia Mahfudz

NIM : 05040321095

telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., M.H.I

NIP. 197704152006041002

Penguji III

Marli Candra, LLB(Hons), MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji II

Dr. Moh. Hatta, M.H.I.

NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.

NIP. 198506242020021024

Surabaya, 13 Oktober 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musaf'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

 **KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yudia Mahfudz
NIM : 05090321095
Fakultas/Jurusan : Syariah dan hukum / hukum pidana Islam
E-mail address : yudia.mahfudz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PENECAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
VIDEO MELANGGAR KEUSILAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM (studi kasus satuan polisi Pamong Praga Surabaya

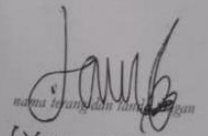
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Nov 2025

Penulis


(Yudia Mahfudz)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pribadi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya”. Merupakan sebuah penelitian untuk menjawab mengenai rumusan masalah 1.) Bagaimana kewenangan dan batasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum di Surabaya? 2.) Bagaimana Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran video berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan studi kasus. Data dianalisis menggunakan deskriptif analisis yang didukung oleh pola pikir induktif. Data dari wawancara didapat dari wawancara dengan Anggota dari Satpol PP, Ketua unit PPA Polrestabes Surabaya, dan Hera si Pekerja seks komersial. Sedangkan Studi Kepustakaan dilakukan dengan penelusuran terhadap buku, jurnal, artikel, skripsi, website dan sebagainya untuk mendapatkan data berhubungan dengan Penyebaran Video Pribadi yang dilakukan oleh satpol PP. Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data, pemilihan data, dan penyusunan data. Teknik analisis data menggunakan kualitatif, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif menggunakan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam tentang penyebaran video pribadi yang dilakukan oleh Satpol PP.

Hasil peneilitian ini menyimpulkan mengenai dua permasalahan, Pertama, Pada dasarnya mengenai kode etik dari Satpol PP khususnya dalam hal etik kepribadian, diketahui bahwa Satpol PP memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya yaitu tidak membuat atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita bohong/ hoaks. Jika dihubungkan dengan kasus ini, maka Satpol PP Surabaya telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Kedua, Permasalahan penegakan hukum tersebut dikarenakan ada tiga penyebab yaitu terdapat adanya oknum-oknum dari Polrestbaes Surabaya enggan untuk melakukan penegakan hukum, ketidakjelasan Perwalik Kota Surabaya mengenai Satpol PP yang tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kode etik Satpol PP Surabaya, dan Pasal 27 ayat (1) terdapat multi tafsir.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran Perlu adanya kajian baru dalam hukum pidana Islam mengenai jarimah ta’zir yang di fokuskan pada konsep tindak pidana penyebaran video pribadi. mengenai kode etik dari Satpol PP khususnya dalam hal etik kepribadian, diketahui bahwa Satpol PP memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya yaitu tidak membuat atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita bohong/ hoaks. Bahwasanya pihak satpol PP Surabaya khususnya dalam bidang tim media setempat perlu untuk melakukan pemberitahuan yang melalui media sosial itu harusnya melakukan sensor wajah terhadap pelaku karena pelaku tersebut juga mempunyai hak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori.....	14
H. Definisi Operasional	15
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	23
TINDAK PIDANA PENYEBERAN VIDEO PRIBADI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	23

A. Tindak Pidana Penyebaran Video Yang Mengandung Muatan Melanggar Kesusilaan Berdasarkan Hukum Positif	23
B. Tindak Pidana Penyebaran Video Pribadi Berdasarkan Hukum Pidana Islam	31
BAB III.....	39
GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DI SURABAYA	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Kode Etik Satpol PP	44
C. Kronologi Kasus	47
D. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila.....	49
E. Hambatan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila	55
BAB IV	57
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO ASUSILA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	57
A. Konsep dan Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Video Pribadi Melanggar Kesusilaan Berdasarkan Undang-Undang ITE.....	57
B. Analisis Jerat Hukum Tindak Pidana Penyebaran Video Melanggar Kesusilaan Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	61
BAB V.....	80
KESIMPULAN	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 14.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagaian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 79
- Ahmad Ward Muslich, *Hukum*, hlm, 253
- Andrew Shady Utama, dkk, *Problematika Penegakan Hukum*, (Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2021), h. 9.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 25-26.
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), h. 49-50.
- Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 261-262
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 100
- Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 7.
- Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 46-48.
- Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).
- Moh. Ali Burhan, "Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota Kediri" (2019).
- Nur Solikin, *Pengantar Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 82.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 193-198.

Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 267–268.

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), h. 41.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 81.

Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister, 2015), 112

JURNAL

Fadhlin and Fadhillatu, “Peran Penegakan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021).

Gomgom T P Siregar, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2021.

Kartin Velencia Fardha, “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5, (2023).

Michelle Leoy Wansaga, Roy Ronny Lembong, dan Harly S. Muaja, “Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,” *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 2, (Jan, 2022).

Supriyanto dan Achmad Sulchan, “Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Maret 2023.

Widyawati, “Penegakan Hukum Dalam Negara Indonesia Yang Demokratis,” *Pledoi: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (September 2022).

Zulfi Diane Zaini dan Muhammad Rifky Hendrian, “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 329/Pid.B/2021/PN TJK)”, *Jurnal Ilmiah Living View*, Vol. 15, No. 1, Januari 2023.

SKRIPSI

Azel Arisandi, “Penegakan hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN Ktl), (Skripsi, Universitas Batanghari, 2022).

Imam Fajri Nur Tsani dan Rehnalemkem Ginting, “Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/PId. Susu/2019/PN. Jkt Brt),” *Jurnal Recidive* 10, no. 1, (Jan-Apr, 2021).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasioanal Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Perwalikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

WEBSITE

Arifin, M. Hamim, “Satpol PP Surabaya: Pendekatan Humanis Untuk Menjaga Kota Surabaya”, *Suara Surabaya*, 1 Desember 2023, akses 6 Maret 2025, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/satpol-pp-surabaya-pendekatan-humanis-untuk-menjaga-kota-surabaya/>.

Auli, Renatha Cristhi, “Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan”, *Hukum Online*, 29 Februari 2024, akses 8 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>.

Dewantary, Zenny Rezanía, “Teori Pidana yang Dianut di Indonesia”, *Hukum Online*, 2 Desember 2024, akses 8 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>.

Tim CNN Indonesia, “Petinggi Satpol PP Surabaya Diduga Jual Barang Hasil Penertiban, *CNN Indonesia*, 4 Juni 2022, akses 7 November 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220604123834-12-804771/petinggi-satpol-pp-surabaya-diduga-jual-barang-hasil-penertiban>.

Tim DetikJabar, “Bentrok Berdarah PKL Vs Satpol PP di Bandung”, *DetikJabar*, 23 Desember 2023, akses 7 November 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7103933/bentrok-berdarah-pkl-vs-satpol-pp-di-bandung>.

Tim Ikom UNESA, “Menelusuri erevald Kembang Kuning, salah satu dari Tujuh Pemakaman Kehormatan Belanda di Idndonesia”, *Ikom Fisipol UNESA*, 29 Januari 2025, akses 6 Maret 2025, <https://ikom.fisipol.unesa.ac.id/post/menelusuri-ereveld-kembang-kuning-salah-satu-dari-tujuh-pemakaman-kehormatan-belanda-di-indonesia>.

Tim Suaka, “Satpol PP DKI Jakarta Kembali Melakukan Kekerasan Terhadap Pengungsi dalam Pengusiran Tenda Pengungsi di Belakang Kantor UNHCR Indonesia”, *Suaka*, 17 Oktober 2024, akses 7 november 2024, https://suaka.or.id/rilis-media_satpol-pp-dki-jakarta-kembali-melakukan-kekerasan-terhadap-pengungsi-dalam-pengusiran-tenda-pengungsi-di-belakang-kantor-unhcr-indonesia/.

Wahyuni, Willa, “Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus”, *Hukum Online*, 19 September 2022, akses 8 Okteber 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/?page=1>.

WAWANCARA

Bagus Dirta Prawita. (ketua Tim Penyelidikan dan Penyidikan dalam Bidang Penegakan Perda). Wawancara, Surabaya, 11 Maret 2025.

Hera. (Pekerja Seks Komersia di Makam Kembang Kuning). Wawancara, 18 Maret 2025.

Triwulandari, Ipda Triwulandari. (Sat Reskrim Polrestabes Suarabaya). Wawancara, Surabaya, 21 Maret 2025